

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Lisrohmatin¹⁾, Suwarno²⁾, Imam Fachruddin³⁾

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: lisrohmatin21@gmail.com

Submitted: 28-08-2025 | Accepted: 29-08-2025 | Published: 31-08-2025

Kata Kunci: SIPD; Efektivitas; Pengelolaan Keuangan Daerah; Transparansi; Akuntabilitas; Good Governance.	Abstrak Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, observasi terhadap penggunaan SIPD, serta analisis dokumen yang mencakup laporan keuangan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam percepatan proses penyusunan anggaran dan kemudahan akses informasi keuangan. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dengan memungkinkan pengawasan lebih terbuka oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi SIPD, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem, gangguan teknis yang menghambat kelancaran penggunaan SIPD, serta adanya perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas SIPD, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan regulasi yang mendukung integrasi sistem keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun SIPD telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek, optimalisasi sistem dan peningkatan kompetensi aparatur masih menjadi faktor penting dalam mencapai efektivitas yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja SIPD agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Keywords: SIPD; Effectiveness; Regional Financial Management; Transparency; Accountability;	Abstract <i>This research employed a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews with relevant officials in the Trenggalek Regency Government, observations of SIPD utilization, and document analysis encompassing financial reports and related regulations. The findings indicate that the implementation of SIPD has yielded positive impacts on regional financial management efficiency, particularly in</i>

and Good Governance.

accelerating the budget preparation process and facilitating access to financial information. Furthermore, the system enhances transparency by enabling more open oversight by stakeholders, including the public and supervisory institutions. However, several challenges persist in SIPD implementation, including limitations in human resources possessing technical skills to operate the system, technical disruptions that impede smooth SIPD usage, and regulatory changes necessitating continuous adjustments. To augment SIPD effectiveness, it is imperative to enhance human resource capacity through ongoing training, optimize information technology infrastructure, and fortify regulations that support comprehensive integration of regional financial systems. Consequently, while SIPD has positively influenced regional financial management in Trenggalek Regency, system optimization and the enhancement of apparatus competence remain pivotal factors in achieving maximum effectiveness. This research aims to provide recommendations for local governments in improving SIPD performance for greater effectiveness and sustainability.

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah dituntut untuk mengadopsi sistem berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sistem yang diterapkan untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih modern dan terintegrasi adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD dirancang untuk memberikan solusi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah yang lebih terstruktur dan berbasis data real-time.

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas pengelolaan keuangan sangat penting, mengingat anggaran daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya SIPD, proses penyusunan anggaran menjadi lebih sistematis, meminimalisir kesalahan manusia (human error), serta meningkatkan keterpaduan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi sistem ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengukur efektivitas SIPD, penelitian ini mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Adisi (2022), yang menilai keberhasilan suatu program atau aktivitas berdasarkan lima indikator utama, yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dari segi pemahaman program, peningkatan terjadi melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai. Namun, metode pelatihan yang digunakan masih belum optimal, sehingga pegawai seringkali harus mencari informasi tambahan melalui forum diskusi informal seperti WhatsApp. Dari aspek ketepatan sasaran, SIPD telah berhasil meningkatkan struktur penyusunan anggaran yang lebih sistematis serta mengurangi kesalahan dalam pengelolaan manual. Selain itu, SIPD memungkinkan penyampaian data real-time yang mendukung transparansi dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam hal ketepatan waktu, sistem ini mempercepat proses perencanaan dan penganggaran dibandingkan metode konvensional. Akan tetapi, gangguan teknis yang masih sering terjadi menghambat pelaporan keuangan tepat waktu. Meski demikian, secara umum tujuan utama penerapan SIPD telah tercapai, sejalan dengan amanat Permendagri 77 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem terintegrasi. SIPD memungkinkan konektivitas langsung dengan pusat, meningkatkan koordinasi antar bagian, serta mendukung peran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dalam mengelola informasi keuangan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi SIPD meliputi adanya pelatihan teknis, diskusi melalui forum, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, beberapa kendala masih dihadapi dalam penerapan SIPD di Kabupaten Trenggalek. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, koneksi internet yang belum stabil di beberapa wilayah, serta ketidakstabilan sistem yang menyebabkan gangguan dalam proses pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, optimalisasi SIPD masih diperlukan agar efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat secara maksimal. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih komprehensif, perbaikan infrastruktur teknologi, serta peningkatan keandalan sistem agar lebih stabil dan responsif. Dengan demikian, implementasi SIPD di Kabupaten Trenggalek dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Trenggalek memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang unik, serta tantangan dan peluang tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan memilih Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat menggali secara mendalam dinamika, tantangan, dan potensi dalam penerapan SIPD di daerah tersebut. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek sendiri serta bagi pemerintah daerah lainnya yang memiliki konteks serupa dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendekatan penelitian Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana SIPD diterapkan dan diadopsi oleh berbagai pihak terkait. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan secara sistematis objek penelitian berdasarkan pada fakta yang terjadi. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggambarkan proses, interaksi, dan pengalaman yang terjadi. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran yang mendetail dan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIPD serta dampaknya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan konteks lokal yang mungkin tidak terukur secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah para pegawai pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan

pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Eko Heri Susanto selaku Kasubbid Penyusunan Anggaran
- b. Imam Safii selaku Staf Bidang Perbendaharaan
- c. Anggan Dias selaku Kasubbag Keuangan BKD
- d. Pangestia Ayu selaku Analis Data
- e. Agytri Wardhatul selaku Analis Data

Melalui partisipasi beragam informan dari berbagai latar belakang dan posisi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas SIPD di Kabupaten Trenggalek, serta memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan bagian integral dari penelitian kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2018). Pengujian keabsahan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dari kesimpulan yang diambil. Dengan demikian, penelitian dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah yang valid dan relevan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif (Miles & Huberman, 2014) dimana prosesnya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Kondensasi Data
- c. Penyajian Data
- d. Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan telah menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan di era digital ini. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) hadir sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, efektivitas suatu sistem tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut dapat digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kabupaten Trenggalek, efektivitas SIPD dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu

pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

1. Pemahaman Program

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa masih banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIPD secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dalam penyampaian materi saat pelatihan, kurangnya sesi praktik langsung, serta metode pelatihan yang cenderung bersifat satu arah tanpa adanya interaksi yang mendalam. Akibatnya, banyak pegawai yang harus mencari informasi tambahan melalui forum diskusi informal, seperti WhatsApp, untuk memahami cara penggunaan SIPD dengan lebih baik.

Menurut teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003), adopsi teknologi baru dalam sebuah organisasi bergantung pada pemahaman dan kemauan individu dalam menerima perubahan. Jika individu tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka adopsi sistem baru akan berjalan lambat dan kurang efektif. Dalam konteks ini, SIPD telah diterapkan, tetapi pemahaman pegawai yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelatihan yang lebih interaktif, seperti mentoring langsung, simulasi penggunaan sistem, serta peningkatan layanan dukungan teknis, agar pemahaman pegawai terhadap SIPD dapat lebih baik.

2. Ketepatan Sasaran

Salah satu indikator efektivitas sistem informasi adalah kemampuannya dalam membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat. Dalam hal ini, SIPD bertujuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih sistematis, akurat, dan transparan. Jika dilihat dari aspek ketepatan sasaran, SIPD di Kabupaten Trenggalek telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Dengan adanya SIPD, proses penyusunan anggaran daerah menjadi lebih terstruktur dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan. Kesalahan dalam penginputan data dapat diminimalisir, dan informasi terkait keuangan daerah dapat diakses secara lebih cepat dan real-time oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1985), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari

sejauh mana sistem yang diterapkan mampu mencapai tujuan dengan cara yang lebih sistematis dan efisien.

3. Ketepatan Waktu

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ketepatan waktu merupakan faktor yang sangat penting, terutama dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Dengan diterapkannya SIPD, seharusnya proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Gangguan teknis, seperti server yang tidak stabil, koneksi internet yang kurang mendukung, serta kesalahan dalam sistem yang menyebabkan data tidak tersimpan dengan sempurna, menjadi kendala utama dalam menjaga ketepatan waktu pengelolaan keuangan daerah.

Teori Manajemen Kinerja dari Kaplan & Norton (1996) menjelaskan bahwa efektivitas sistem informasi dapat diukur berdasarkan efisiensi operasionalnya, termasuk dalam hal ketepatan waktu. Jika sistem mengalami gangguan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan data, maka efektivitasnya dapat dikatakan belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan infrastruktur teknologi serta memastikan bahwa server SIPD memiliki kapasitas yang memadai agar dapat bekerja secara stabil tanpa gangguan.

4. Pencapaian Tujuan

Tujuan utama dari penerapan SIPD adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam hal ini, Kabupaten Trenggalek telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan. Dengan adanya SIPD, penyajian data keuangan daerah menjadi lebih terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, konektivitas antara pemerintah daerah dan pusat menjadi lebih terintegrasi, sehingga koordinasi dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki salah satunya adalah peningkatan pelatihan teknis bagi pegawai, perbaikan sistem untuk mengatasi kendala teknis, serta penguatan kebijakan yang mendukung penerapan SIPD secara lebih efektif.

5. Perubahan Nyata

Menurut teori perubahan organisasi dari Kurt Lewin (1951), keberhasilan implementasi sistem baru dapat diukur dari perubahan yang dihasilkan dalam lingkungan kerja. Dalam hal ini, penerapan SIPD telah membawa perubahan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek.

Oleh karena itu, agar perubahan yang dihasilkan oleh SIPD dapat lebih luas dan berdampak maksimal, diperlukan strategi tambahan, seperti peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kebijakan yang mendukung digitalisasi keuangan daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah ke dalam satu platform berbasis digital yang dapat diakses oleh pemerintah daerah maupun pusat. Namun, efektivitas suatu sistem tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dijalankan, diterima, dan diadaptasi oleh para penggunanya. Dalam kasus Kabupaten Trenggalek, efektivitas SIPD dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung keberhasilannya maupun yang menghambat kelancarannya. Untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor ini berperan, kita akan membahas dua aspek utama: faktor pendukung yang mempercepat dan memperlancar implementasi SIPD serta faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam penerapan sistem ini.

Faktor Pendukung Efektivitas SIPD

1. Kebijakan yang Jelas dan Regulasi yang Mendukung

Keberhasilan suatu sistem informasi dalam pemerintahan sangat bergantung pada adanya kebijakan yang jelas sebagai pedoman utama dalam penerapannya. SIPD di Kabupaten Trenggalek berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, yang wajibkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menggunakan SIPD sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adanya regulasi ini memberikan kepastian hukum serta standar yang harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah daerah. Dengan aturan yang jelas, implementasi SIPD tidak berjalan tanpa arah, tetapi memiliki landasan yang kuat dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Regulasi ini juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistemnya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Pelatihan Pegawai dan Peningkatan Kapasitas SDM

Sistem informasi tidak dapat berjalan dengan efektif jika penggunanya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara mengoperasikannya. Oleh karena itu, pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan SIPD di Kabupaten Trenggalek. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para pegawai dalam menggunakan SIPD serta memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang berkaitan dengan sistem ini. Pegawai yang terlatih dengan baik akan lebih mampu menginput, mengelola, dan menganalisis data keuangan secara akurat dan efisien. Beberapa pegawai mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru, terutama yang sebelumnya lebih terbiasa dengan metode manual atau sistem lama yang berbeda dengan SIPD. Oleh karena itu, selain pelatihan, diperlukan pendekatan lain seperti mentoring dan forum diskusi antarpegawai untuk mempercepat proses adaptasi terhadap sistem ini.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu manfaat utama dari penerapan SIPD adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan data keuangan untuk diakses secara real-time, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan atau manipulasi data. Dengan adanya SIPD, setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, terdokumentasi dengan baik dalam sistem. Hal ini memberikan kemudahan dalam proses audit serta memudahkan pengawasan baik oleh internal pemerintah daerah maupun oleh lembaga eksternal seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, dengan keterbukaan data yang lebih baik, masyarakat juga memiliki peluang untuk memperoleh informasi yang lebih transparan mengenai bagaimana anggaran daerah dikelola. Dengan demikian, SIPD

berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan.

Faktor Penghambat Efektivitas SIPD

Meskipun SIPD membawa banyak manfaat, penerapannya di Kabupaten Trenggalek masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih optimal.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Salah satu kendala utama dalam implementasi SIPD adalah masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem ini. Masalah ini timbul karena beberapa faktor, di antaranya:

- Tidak semua pegawai memiliki latar belakang teknologi yang kuat.
- Adaptasi terhadap sistem baru membutuhkan waktu, terutama bagi pegawai yang sebelumnya lebih terbiasa dengan metode manual.
- Minimnya tenaga ahli yang dapat memberikan pendampingan jika terjadi kendala dalam penggunaan sistem.

Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989), efektivitas suatu sistem informasi sangat bergantung pada perceived usefulness (manfaat yang dirasakan) dan perceived ease of use (kemudahan penggunaan sistem) oleh penggunanya. Jika pegawai merasa sistem ini sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam pekerjaan mereka, maka mereka cenderung enggan untuk menggunakannya secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelatihan dan memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif agar pegawai dapat lebih percaya diri dalam menggunakan SIPD.

2. Koneksi Internet yang Tidak Stabil

Sebagai sistem berbasis daring, SIPD membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, di beberapa wilayah Kabupaten Trenggalek, akses internet masih menjadi kendala.

Ketidakstabilan koneksi internet berdampak pada beberapa hal, seperti:

- Lambatnya proses penginputan dan pengolahan data, sehingga menghambat ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.
- Gagalnya sinkronisasi data dengan server pusat, yang menyebabkan beberapa informasi tidak terupdate secara real-time.

- Kesulitan dalam mengakses sistem di luar jam kerja, terutama bagi pegawai yang bekerja dari lokasi dengan jaringan internet yang lemah.

Dalam perspektif teori birokrasi dari Max Weber (1947), efektivitas administrasi sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang mendukungnya. Tanpa jaringan internet yang memadai, sistem informasi yang seharusnya mempercepat pekerjaan justru bisa menjadi penghambat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan kualitas jaringan internet di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.

3. Gangguan Sistem dan Ketidakstabilan Server

Selain masalah koneksi internet, gangguan teknis dalam SIPD juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasinya. Beberapa masalah yang sering terjadi meliputi:

- Sistem yang sering mengalami error atau lambat diakses, terutama saat beban pengguna tinggi.
- Lambatnya respons dari pusat dalam menangani keluhan teknis, sehingga pegawai harus mencari solusi sendiri atau menunda pekerjaan mereka.
- Kurangnya fitur pemulihan data yang cepat, sehingga jika terjadi kesalahan, proses perbaikannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dalam konsep Total Quality Management (TQM) dari Deming (1986), suatu sistem harus terus mengalami perbaikan berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama pengembang SIPD perlu meningkatkan stabilitas sistem, mempercepat respons teknis, serta menyediakan fitur backup data yang lebih efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menjawab rumusan masalah pertama, efektivitas SIPD dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Penggunaan SIPD telah memperbaiki mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dengan mengurangi kesalahan

akibat proses manual serta memungkinkan akses data secara real-time. Namun, meskipun sistem ini secara umum telah berjalan efektif, masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal.

Menjawab rumusan masalah kedua, keberhasilan penerapan SIPD didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain: adanya kebijakan yang jelas melalui Permendagri 77 Tahun 2020, pelatihan pegawai dalam meningkatkan pemahaman sistem, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor ini membantu mendorong efektivitas sistem dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam tata kelola keuangan daerah. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dalam penerapan SIPD di Kabupaten Trenggalek. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem, koneksi internet yang tidak stabil di beberapa wilayah, serta gangguan teknis pada sistem yang menghambat kelancaran operasional SIPD. Faktor-faktor ini menyebabkan beberapa aspek pengelolaan keuangan belum berjalan sepenuhnya optimal, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan efisiensi sistem. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih intensif, peningkatan infrastruktur jaringan internet, serta optimalisasi stabilitas sistem SIPD agar lebih responsif dan minim gangguan teknis. Jika kendala-kendala ini dapat diatasi, maka SIPD dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Trenggalek.

SARAN

Adapun saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Perbaiki mekanisme komunikasi antara pengguna dan pengembang untuk respons yang lebih cepat terhadap masalah teknis. Membuka saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti layanan bantuan teknis 24 jam, atau platform umpan balik langsung, dapat mempercepat penyelesaian masalah dan meminimalisir downtime sistem.
- b. Adakan pelatihan dan workshop berkala untuk meningkatkan keterampilan pengguna dalam menggunakan SIPD. Materi pelatihan dapat disesuaikan

dengan tingkat pemahaman pengguna, termasuk pelatihan lanjutan untuk staf yang lebih berpengalaman dan dasar bagi pemula.

- c. Tingkatkan kualitas infrastruktur pendukung seperti koneksi internet dan perangkat keras yang digunakan untuk mengakses SIPD. Pemerintah desa atau instansi terkait dapat berinvestasi dalam teknologi yang lebih stabil dan memastikan koneksi yang lebih baik.
- d. Lakukan pembaruan sistem secara berkala dengan pemberitahuan yang jelas kepada pengguna terkait perubahan atau penambahan fitur. Pengelolaan pembaruan harus dilakukan dengan baik untuk menghindari ketidakstabilan sistem pasca-pembaruan.
- e. Bangun sistem dukungan pengguna yang responsif dan mudah diakses, termasuk pusat bantuan atau forum komunitas untuk berbagi pengalaman dan solusi. Selain itu, pastikan mekanisme umpan balik dapat digunakan untuk terus memperbaiki sistem berdasarkan masukan pengguna.

REFERENSI

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164.
- Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). *E Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi)* (Vol. 1). Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.
- Cahyadi, N., S ST, M. M., Joko Sabtohadji, S. E., Alkadrie, S. A., SE, M. M., Megawati, S. P., BI, M. P., Khasanah, S. P., Kom, M., & Djajasinga, I. N. D. (2023). *Manajemen sumber daya manusia*. CV Rey Media Grafika.
- Dwi, O. (2022). *Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Guna Meningkatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Desa Sirnoboyo Kecamatan Benjeng-Gresik)*. Universitas Wijaya Putra.
- Farhani, A., & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 65–78.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Frendy Wibowo, S. E., MM, M. S., Utomo, C. W., SE, M. M., & Nurul Aisah, S. E. (2023).

Manajemen Sumber Daya Manusia. Unisri Press.

Hasibuan, R. (2023). *Pengantar Bisnis.* Absolute Media.

Khasanah, J. S. N., & Jaya, A. (2023). *Pengantar Manajemen.* Nawa Litera Publishing.

Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif.* Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. .., & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.

Moleong, L. J. (2018). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-37. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*

Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori.* Pustaka Pelajar.

Nuzleha, N., Yamin, Y., & Safitri, M. (2023). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen.*

Oberthür, S., & Groen, L. (2015). The Effectiveness Dimension of the EU's Performance in International Institutions: Toward a More Comprehensive Assessment Framework. *Journal of Common Market Studies*, 53(6), 1319–1335.

Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 194–211.

Siagian, S. P. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja.* PT Rineka Cipta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian.* Alfabeta.

Taneo, M., Madu, A., & Krisnawati, N. (2023). Pendampingan Penerapan Metode Field Trip bagi Guru SD SMP dan SMA di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(1), 93–106.

Toralawe, Y., Dama, M. N., & Gani, I. P. (2023). Pengaruh Disiplin dan Motivasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 61–70.

Tumbel, G. H., & Sos, S. (2023). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK.* Penerbit Lakeisha.